

# Tantangan dan Efektivitas Peran Wakil Kepala Daerah dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah (Studi Kasus DKI Jakarta)

## Challenges and Effectiveness of Deputy Regional Heads' Role in Local Government Policy Implementation (Case Study of Jakarta Capital Region)

Dedy Kusna Utama <sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Jakarta, Indonesia

<sup>1</sup> dedy.kusnautama@stiami.ac.id

\* Corresponding Author : Dedy Kusna Utama

### ARTICLE INFO

### ABSTRACT

#### Article history:

Received : June 17, 2025

Revised : June 18, 2025

Accepted : June 19, 2025

#### Keywords:

Administrative Efficiency;

Deputy Regional Head;

Governance;

Policy Implementation;

Political Dynamics;

#### Kata kunci:

Efisiensi Administrasi;

Wakil Kepala Daerah;

Pemerintahan;

Implementasi Kebijakan;

Dinamika Politik;



This is an open access article under the CC-BY-SA license.

Copyright (c) 2025

Transparansi : Jurnal Ilmiah

Ilmu Administrasi

*This study examines the role of deputy regional heads in Jakarta Capital Region (DKI Jakarta) and the challenges they face in implementing local government policies. The research identifies key issues, including ambiguous authority delegation, political interference, and administrative inefficiencies. Using a qualitative approach, the study analyzes legislative documents, government data, and expert interviews to evaluate policy effectiveness. Findings reveal that power imbalances and bureaucratic obstacles hinder the deputy governor's role, affecting governance stability and policy execution. Recommendations include establishing a clearer policy framework, codifying deputy heads' responsibilities, reducing political intervention, enhancing coordination mechanisms, and ensuring leadership continuity. These measures aim to improve governmental efficiency and public service delivery in Jakarta and other local administrations.*

#### Abstrak

Studi ini mengkaji peran wakil kepala daerah di DKI Jakarta dan tantangan yang mereka hadapi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Penelitian ini mengidentifikasi isu-isu utama, termasuk ketidakjelasan delegasi kewenangan, pengaruh politik, dan ketidakefisienan administrasi. Menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menganalisis dokumen legislatif, data pemerintahan, dan wawancara dengan para ahli untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa ketidakseimbangan kekuasaan dan hambatan birokrasi menghalangi peran wakil gubernur, mempengaruhi stabilitas pemerintahan dan pelaksanaan kebijakan. Rekomendasi termasuk pembentukan kerangka kebijakan yang lebih jelas, pengusulan kebijakan yang dengan tegas menetapkan tugas wakil kepala daerah, pengurangan campur tangan politik, peningkatan mekanisme koordinasi, dan memastikan kelangsungan kepemimpinan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pemerintahan dan penyampaian layanan publik di Jakarta dan pemerintah daerah lainnya.

## PENDAHULUAN

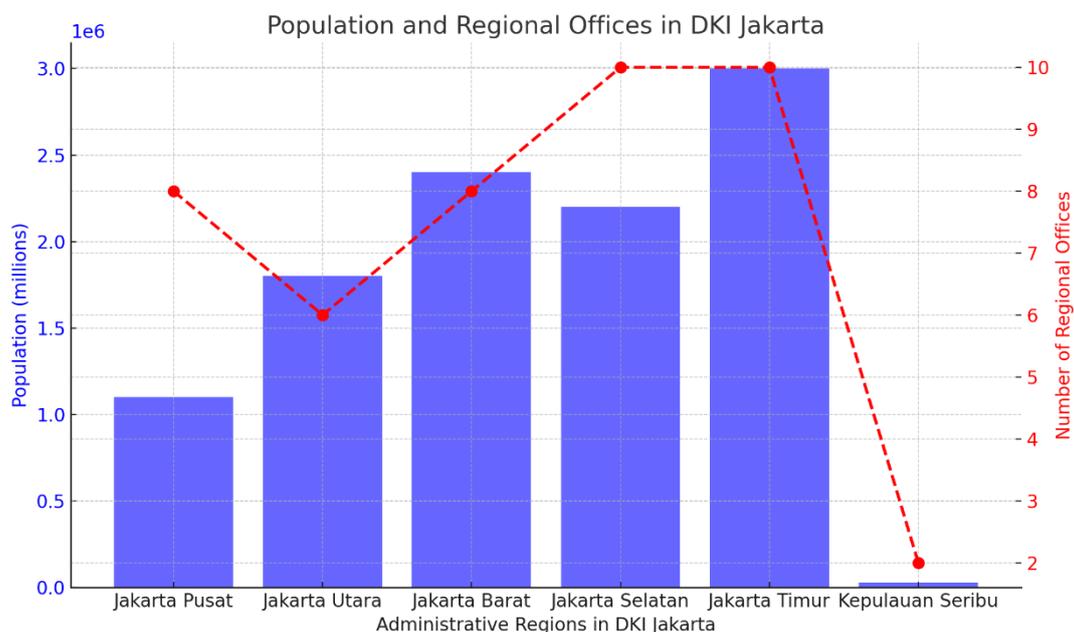
Kebijakan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengelola urusan publik yang telah didelegasikan oleh pemerintah pusat. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, kepala daerah, baik gubernur, bupati, maupun walikota, memegang tanggung jawab utama dalam melaksanakan kebijakan daerah. Namun, mereka tidak bekerja sendirian; mereka didampingi oleh wakil kepala daerah yang membantu dalam pelaksanaan administratif. Dalam praktiknya, peran wakil kepala daerah seringkali menghadapi tantangan implementasi. Studi menunjukkan bahwa banyak wakil kepala daerah mengalami ketidakjelasan tugas, dominasi oleh kepala daerah, dan celah wewenang yang memengaruhi efektivitas kebijakan publik. Masalah ini juga umum terjadi di DKI Jakarta, wilayah dengan karakteristik unik sebagai ibu kota negara dan pusat ekonomi terbesar. Salah satu kasus yang menonjol adalah pengunduran diri Sandiaga Uno sebagai Wakil Gubernur Jakarta pada 2018, yang menyebabkan kekosongan jabatan selama 18 bulan sebelum Ahmad Riza Patria ditunjuk pada

2020 Kekosongan posisi wakil gubernur selama 18 bulan menunjukkan bahwa pengisian posisi ini bukanlah prioritas, dan kurangnya penugasan serta kewajiban yang jelas dari gubernur kepada wakil gubernur, seperti yang diamanatkan dalam peraturan daerah atau keputusan gubernur.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan perubahannya, wakil kepala daerah bertanggung jawab untuk membantu urusan pemerintahan, mengoordinasikan aparatur daerah, dan mengevaluasi kinerja tata kelola. Namun, ketidakseimbangan kekuasaan dan dinamika politik seringkali menghambat pelaksanaan tugas-tugas tersebut. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintahan daerah terkait peran wakil kepala daerah di DKI Jakarta guna mengidentifikasi tantangan yang ada dan mengusulkan solusi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah.

Beberapa fenomena menggambarkan permasalahan yang berkaitan peran wakil kepala daerah di DKI Jakarta. Pertama, ketidakseimbangan kewenangan terlihat jelas, karena meskipun tanggung jawabnya telah diatur dengan jelas dalam peraturan, wakil gubernur sering kali kekurangan ruang yang memadai untuk menjalankan tugasnya. Kedua, kekosongan jabatan, seperti yang terlihat selama periode 2018-2020, menunjukkan bahwa posisi wakil gubernur bukanlah posisi yang diprioritaskan atau dianggap penting, mengingat kekosongan yang terjadi selama 18 bulan. Terakhir, hubungan politik dan dinamika internal sering mempengaruhi pembagian tugas, yang sering kali ditentukan oleh kesepakatan koalisi pragmatis daripada kebutuhan administratif.

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen legislatif seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, data tata kelola dari Sekretariat Pemerintah Daerah Jakarta, wawancara dan observasi dengan pejabat terkait, serta studi akademik sebelumnya tentang peran wakil kepala daerah di Indonesia.



Sumber Data : Diolah oleh Peneliti 2025

Representasi grafis berikut menggambarkan jumlah aparatur daerah dan pembagian administratif DKI Jakarta, yang memainkan peran penting dalam tanggung jawab koordinasi wakil gubernur. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai efektivitas implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait tugas-tugas wakil kepala daerah, khususnya di DKI Jakarta, serta merumuskan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi tata kelola lokal.

## KAJIAN PUSTAKA

Teori kebijakan publik menawarkan berbagai perspektif mengenai formulasi dan implementasi kebijakan. Anderson (2015) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian tindakan yang diadopsi dan diimplementasikan oleh lembaga pemerintah untuk mengatasi masalah sosial. Teori administrasi publik, seperti teori prinsipal-agen, berargumen bahwa delegasi wewenang dalam tata kelola sangat penting untuk efisiensi, namun dapat menimbulkan masalah prinsipal-agen, di mana agen (wakil kepala daerah) tidak sepenuhnya selaras dengan tujuan prinsipal (gubernur). Teori lain yang relevan adalah model tata kelola yang diusulkan oleh Rhodes (1996), yang menekankan jaringan kebijakan dan peran berbagai pemangku kepentingan dalam tata kelola, menyoroti bagaimana dinamika politik dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dan pelaksanaan administratif.

Beberapa studi empiris telah mengkaji peran wakil kepala daerah dalam tata kelola. Labolo (2020) meneliti disfungsi wakil kepala daerah di Indonesia, menemukan bahwa delegasi wewenang yang tidak jelas dan tawar-menawar politik sering menghambat efektivitas mereka. Makawi (2021) juga menganalisis tantangan peran wakil kepala daerah dan menemukan bahwa meskipun ada kerangka hukum, dominasi politik oleh kepala daerah membatasi ruang lingkup operasional mereka. Zimmermann, Leonel, dan Kontopp (2023) menyarankan bahwa reformasi struktur tata kelola diperlukan untuk meningkatkan efektivitas wakil kepala daerah, terutama di kawasan metropolitan besar seperti Jakarta. Studi tambahan oleh Yahuda dan Michael (2024) serta Aermadepa dkk. (2024) menyoroti aspek hukum dan konstitusional peran wakil kepala daerah, menekankan perlunya kerangka regulasi yang lebih jelas.

Penelitian terbaru juga mengkaji dinamika tata kelola regional di Jakarta. Studi oleh Zulfi dan Yusa (2022) tentang pemilihan gubernur Jakarta 2017 menunjukkan bahwa afiliasi politik secara signifikan mempengaruhi efektivitas tata kelola. Demikian pula, penelitian oleh Howard dan Petter (2024) tentang kontroversi seputar peran wakil kepala daerah menyarankan bahwa reformasi administratif diperlukan untuk mengatasi ketidakefisienan. Kebutuhan akan pembagian tugas yang jelas antara gubernur dan wakilnya merupakan tema yang sering muncul dalam penelitian tata kelola, menekankan pentingnya reformasi institusional.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif untuk menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah terkait tugas-tugas wakil kepala daerah di DKI Jakarta. Metode pengumpulan data meliputi wawancara mendalam dengan pembuat kebijakan, pejabat pemerintah daerah, dan ahli administrasi publik. Selain itu, analisis dokumen dilakukan untuk meneliti kerangka hukum, peraturan gubernur, dan laporan tata kelola dari Sekretariat Pemerintah Daerah Jakarta. Penelitian ini juga menggunakan observasi langsung untuk menilai pelaksanaan kebijakan secara praktis dan tantangan yang dihadapi oleh wakil kepala daerah dalam perannya. Triangulasi data diterapkan untuk memastikan validitas dan reliabilitas temuan, dengan menggabungkan wawasan dari wawancara, analisis dokumen, dan data observasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis tematik untuk mengkategorikan dan menafsirkan data, mengidentifikasi tema-tema yang berulang terkait efektivitas kebijakan, dinamika tata kelola, dan tantangan administratif. Dengan menerapkan metodologi ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan komprehensif tentang celah-celah yang ada dalam implementasi kebijakan dan mengusulkan rekomendasi untuk meningkatkan struktur tata kelola di Jakarta dan pemerintahan daerah lainnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

Temuan studi ini mengungkap beberapa isu penting terkait implementasi kebijakan yang berkaitan dengan wakil kepala daerah di DKI Jakarta. Pertama, ketidakjelasan delegasi wewenang menyebabkan ketidak efisienan dalam pengambilan keputusan administratif. Banyak wakil gubernur melaporkan kurangnya tugas dan tanggung jawab yang jelas, yang mengakibatkan peran pasif dalam pemerintahan. Kedua, faktor politik secara signifikan mempengaruhi efektivitas peran wakil gubernur.

Koalisi politik yang terbentuk selama pemilihan seringkali menentukan dinamika kekuasaan antara gubernur dan wakil gubernur, yang berpotensi marginalisasi terhadap tugas-tugas wakil gubernur.

Selain itu, tantangan birokrasi diidentifikasi sebagai hambatan utama lainnya. Tumpang tindih tanggung jawab antara berbagai lembaga daerah mempersulit upaya koordinasi, membatasi kemampuan wakil gubernur untuk melaksanakan kebijakan secara efektif. Selain itu, celah tata kelola diamati dalam penyampaian layanan publik, di mana implementasi kebijakan yang tidak efektif mempengaruhi kepuasan warga dan efisiensi administratif.

Lebih lanjut, studi ini mengidentifikasi bahwa kekosongan posisi wakil gubernur antara tahun 2018 hingga 2020 menciptakan kekosongan pada posisi wakil gubernur yang tidak berdampak pada penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan kepada masyarakat, yang tetap dapat berjalan meskipun tanpa adanya wakil gubernur. Wawancara dengan pejabat pemerintah daerah menyoroti kebutuhan akan mekanisme institusional untuk memastikan kelangsungan kepemimpinan bahkan dalam kasus kekosongan jabatan yang tidak terduga (Korbi, Ben-Slimane, dan Triki 2021; Rekers dan Stihl 2021).

Berdasarkan temuan ini, penelitian ini merekomendasikan untuk memperkuat kerangka kebijakan yang mengatur wakil kepala daerah dengan mendefinisikan secara jelas peran dan tanggung jawab mereka. Penguatan dukungan institusional dan program pengembangan kapasitas dapat meningkatkan efektivitas wakil gubernur dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu, mengurangi campur tangan politik dalam fungsi administratif sangat penting untuk memastikan tata kelola regional yang efektif.

**Tabel 1.** Distribusi Kewenangan Wakil Gubernur DKI (2017–2024)

Tugas	Dasar Hukum	Implementasi (%)
Koordinasi OPD	UU 23/2014 Pasal 64(2)a	35% (tidak rutin)
Evaluasi Kinerja	Pergub 15/2019 Pasal 3	12% (hanya formal)
Penanganan Krisis	Surat Keputusan Ad-hoc	8% (kasus tertentu)

Sumber Data : Diolah oleh Peneliti 2025

## Pembahasan

Temuan penelitian ini menyoroti beberapa isu kunci dalam implementasi kebijakan wakil kepala daerah di DKI Jakarta. Ketidakjelasan delegasi wewenang menjadi masalah serius, karena banyak wakil kepala daerah kesulitan dengan deskripsi pekerjaan yang kabur dan tanggung jawab yang tidak jelas. Ketidakjelasan ini menyebabkan inefisiensi dalam tata kelola yang membatasi peran wakil.

Dinamika politik juga memainkan peran krusial dalam membentuk efektivitas wakil kepala daerah. Banyak penunjukan dipengaruhi oleh kesepakatan koalisi daripada meritokrasi, sehingga membatasi otonomi wakil. Temuan menunjukkan bahwa afiliasi politik seringkali menentukan tingkat tanggung jawab yang diberikan kepada wakil kepala daerah, yang berdampak pada efisiensi tata kelola (Ayadi 2025; Stoner-Weiss 2021).

Selain itu, hambatan administratif dan birokratis menghambat implementasi kebijakan yang efektif. Struktur pemerintahan daerah yang kompleks di Jakarta, serta kekosongan jabatan wakil gubernur yang berlangsung lama antara 2018 dan 2020, lebih lanjut menyoroti kelemahan struktural. Namun, kekosongan jabatan tersebut tidak menyebabkan penundaan kebijakan penting, yang menyoroti perlunya perlindungan kelembagaan untuk memastikan kelangsungan pemerintahan (Omweri 2024; Yimenu 2024).

Untuk mengatasi masalah ini, studi ini merekomendasikan delegasi wewenang yang lebih terstruktur dengan kerangka kebijakan yang jelas yang mendefinisikan peran wakil kepala daerah. Peningkatan kapasitas institusional dan pengurangan campur tangan politik dalam tugas-tugas administratif merupakan langkah-langkah krusial untuk meningkatkan efisiensi tata kelola di Jakarta dan administrasi daerah lainnya.

## KESIMPULAN

Studi ini menyimpulkan bahwa peran wakil kepala daerah di DKI Jakarta menghadapi tantangan yang signifikan akibat ketidakjelasan delegasi wewenang, pengaruh politik, dan ketidakefisienan administratif. Ketidakjelasan kerangka kerja yang jelas untuk tugas-tugas wakil gubernur telah menyebabkan ketidakefisienan, dengan banyak tanggung jawab yang terpusat di bawah gubernur. Dinamika politik sering membatasi efektivitas wakil gubernur, membatasi kemampuannya untuk berkontribusi pada reformasi pemerintahan. Kekosongan jabatan wakil gubernur yang berlangsung lama antara 2018 dan 2020 menegaskan pentingnya struktur kepemimpinan yang stabil dan berkelanjutan untuk memastikan pelaksanaan kebijakan yang efektif.

## Rekomendasi

Untuk meningkatkan efektivitas wakil kepala daerah, penelitian ini merekomendasikan untuk membentuk kerangka kebijakan yang jelas mendefinisikan peran, tanggung jawab, dan kewenangan mereka untuk menghindari ambiguitas administratif dan memastikan akuntabilitas. Mengurangi campur tangan politik dalam penunjukan wakil kepala daerah dengan mempromosikan seleksi berbasis merit dapat memperkuat otonomi pemerintahan dan efisiensi operasional. Selain itu, program penguatan institusional dan pengembangan kapasitas harus dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan administratif dan kepemimpinan mereka, memastikan bahwa mereka dapat menjalankan peran mereka dengan efektif. Terakhir, memastikan kelangsungan kepemimpinan melalui rencana darurat dapat mencegah kekosongan jabatan yang berkepanjangan dan menjaga stabilitas pemerintahan. Dengan melaksanakan rekomendasi ini, DKI Jakarta dan pemerintah daerah lainnya dapat meningkatkan efisiensi pemerintahan, mengurangi hambatan administratif, dan menciptakan distribusi kekuasaan yang lebih seimbang antara gubernur dan wakil gubernur. Penguatan peran kelembagaan wakil kepala daerah akan berkontribusi pada pelaksanaan kebijakan yang lebih efektif dan penyampaian layanan publik yang lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abbott, Kenneth W., and Benjamin Faude. 2022. "Hybrid Institutional Complexes in Global Governance." *The Review of International Organizations* 17(2):263–91.
- Aermadepa, Aermadepa, Apriyanto Apriyanto, Yulfa Mulyeni, Loso Judijanto, Rifqi Devi Lawra, and Yulia Nizwana. 2024. *Penegakan Hukum Pemilu Dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak Indonesia Tahun 2024*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Anderson, Karen M. 2015. *Social Policy in the European Union*. Springer.
- Ayadi, Arjun Bahadur. 2025. "Implementation of Federalism in Nepal: Insights from Karnali Province." *Journal of Political Science* 25:1–25.
- Foss, Nicolai, Jens Schmidt, and David Teece. 2023. "Ecosystem Leadership as a Dynamic Capability." *Long Range Planning* 56(1):102270.
- Howard, Cosmo, and Pandanus Petter. 2024. "Queensland." LSE Press.
- Korbi, Fadia Bahri, Karim Ben-Slimane, and Dora Triki. 2021. "How Do International Joint Ventures Build Resilience to Navigate Institutional Crisis? The Case of a Tunisian-French IJV during the Arab-Spring." *Journal of Business Research* 129:157–68.
- Makawi, Panhar. 2021. "General Review Of The Appointment Of Active Polri Members To Answer As Regional Head (Case Study: Appointment OF Pol Commissioner General Mochamad Iriawan AS Acting Governor OF West Java)." *Rigeo* 11(6).

- Omweri, F. S. 2024. "The Constitutional Eschatology of Decentralization in Kenya: Exploring Federalism's Role in Shaping the Future of Devolution and Regional Autonomy." *International Journal of Innovative Scientific Research* 2(3):37–67.
- Rekers, Josephine V, and Linda Stihl. 2021. "One Crisis, One Region, Two Municipalities: The Geography of Institutions and Change Agency in Regional Development Paths." *Geoforum* 124:89–98.
- Rhodes, Roderick Arthur William. 1996. "The New Governance: Governing without Government." *Political Studies* 44(4):652–67.
- Stoner-Weiss, Kathryn. 2021. *Local Heroes: The Political Economy of Russian Regional Governance*. Princeton University Press.
- Yahuda, Efron Lasa, and Tomy Michael. 2024. "Konstitusionalitas Penunjukan Penjabat Kepala Daerah Dalam Perspektif Pasal 18 Ayat (4) UUD NRI 1945." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2(4).
- Yimenu, Bizuneh. 2024. "The Political Economy of Fiscal Transfers: The Case of Ethiopia." *Public Administration and Development* 44(3):212–29.
- Zimmermann, Karsten, Ana Lia Leonel, and Marcio A. Kontopp. 2023. "Metropolitan Governance in the Context of Dynamic Urbanization: The Case of Brazil." *Frontiers in Political Science* 5:1148522.